

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan, pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional, pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun, pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Ace, 2015)

Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) baru-baru ini menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen. (BPS,2017)

Pembangunan manusia yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia adalah dalam menyiapkan lapangan pekerja, pemerintah memberikan jaminan atas jumlah dan kualitas pekerjaan masyarakat serta menyiapkan lapangan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Merancang sistemnya atau merealisasikan sistem dan mekanisme dimana warga lebih terjamin khususnya dipekerjaan, keselamatan pekerjaan dan terjamin masa depannya nanti. Pemerintah juga harus memperhatikan ketimpangan satu daerah dengan daerah lain yang begitu tinggi, hal tersebut penting diperhatikan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (Gunardi, 2017).

Pembangunan manusia di Jawa Tengah pada tahun 2016 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah. Pada tahun 2016, IPM Jawa Tengah telah mencapai 69,98, angka ini meningkat sebesar 0,49 poin dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah pada tahun 2015 yang sebesar 69,49. Pada tahun 2016, pembangunan manusia di Jawa Tengah masih berstatus “sedang”, masih sama dengan statusnya pada tahun 2015. IPM Jawa Tengah pada tahun 2016 tumbuh sebesar 0,71 persen dibandingkan tahun 2015.

Selama periode 2015 hingga 2016, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 70,90 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun, meningkat 0,17 tahun dibandingkan pada 2015. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun,

meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp 10,42 juta rupiah pada tahun 2016, meningkat Rp 270 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya (BPS,2017).

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak yaitu :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Pasal 1 angka 6 UU No 32 Tahun 2004) berhak mengurus urusan pemerintahannya, urusan pemerintahan yang tertulis pada Pasal 12 UU No 32 Tahun 2004 memberikan panduan, yaitu: (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Selanjutnya urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 7 UU No 32 Tahun 2004). Urusan Pemerintahan ini ada yang diklasifikasi menjadi urusan wajib dan dalam konstruksi UU No 32 Tahun 2004 ada urusan wajib bersekala provinsi dan bersekala kabupaten, sebagaimana diatur pada Pasal 13 (Endra, 2013).

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM (Indeks Pemanguan Manusia) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode

penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi perhitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata – rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata – rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Standar hidup yang layaknya digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Perhitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing – masing komponen indeks (Aris,2017)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status

pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Jawa Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2016. IPM Jawa Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2016. IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 66,08 pada tahun 2010 menjadi 69,98 pada tahun 2016. Selama periode tersebut IPM Jawa Tengah Rata – rata tumbuh sebesar 0,98 persen per tahun. Pada periode 2015-2016, IPM Jawa Tengah meningkat 0,49 poin. Peningkatan pada periode lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode 2014-2015, yang naik sebesar 0,71 poin.

Meskipun selama periode 2010 hingga 2016 IPM Jawa Tengah menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Jawa Tengah masih stagnan (lamban). Hingga saat ini, pembangunan manusia di Jawa Tengah masih berstatus sedang dan masih sama sejak tahun 2010. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. (BPS, 2017)

Tabel 1.1**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah Menurut Komponen, 2010-2016**

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Tahun	72,73	72,91	73,09	73,28	73,88	73,96	74,02
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	11,09	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38	12,45
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,71	6,74	6,77	6,80	6,93	7,03	7,15
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	8.992	9.296	9.497	9.618	9.640	9.930	10.153
IPM		66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98
Pertumbuhan IPM	%		0,84	0,86	1,21	1,12	1,04	0,71

Sumber : BPS, 2017

Pada tahun 2016, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 63,98 (Kabupaten Brebes) hingga 81,19 (Kota Semarang). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Angka Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 68,41 tahun (Kabupaten Brebes) hingga 77,46 tahun (Kabupaten Sukoharjo). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,37 tahun (Kabupaten Brebes) hingga 14,98 tahun (Kota Salatiga), serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berkisar antara 6,05 tahun (Kabupaten Pemalang) hingga 10,49 tahun (Kota Semarang). Sedangkan, pengeluaran perkapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 7,45 juta rupiah per tahun (Kabupaten Pemalang) hingga 14,81 juta rupiah per tahun (Kota Salatiga).

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2016 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten yang berstatus sedang berkurang dari 20 kabupaten/kota pada tahun 2015 menjadi 17 kabupaten pada tahun 2016. Tiga kabupaten yang berstatus sedang pada tahun 2016 berubah status menjadi tinggi pada tahun 2016 adalah Kabupaten Demak, Kendal dan Banyumas. Tiga Kota yang berstatus sangat tinggi yaitu Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Salatiga.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2015 hingga 2016, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Batang (1,41%), Kabupaten Brebes (1,27%) dan Kabupaten Tegal (1,23%). Kemajuan pembangunan manusia di 3 daerah tersebut terutama didorong oleh dimensi pendidikan. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Klaten (0,22%), Kota Salatiga (0,22%), dan Kabupaten Kudus (0,30%) tercatat paling lambat di Jawa Tengah selama tahun 2015-2016. (IPM, 2016)

Dari data tahun 2013 - 2017 diketahui bahwa perkembangan penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ketahun berfluktuatif sehingga diperlukan beberapa program untuk meminimalisir tingkat fluktuasi dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadi efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan.

Kebijakan otonomi daerah merupakan sarana untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik karena kebijakan ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah daerah akan lebih efisien dalam mengelola sumberdaya yang tersedia pada masing – masing daerah dan penyediaan barang – barang *public* untuk memperlancar kegiatan perekonomian (oectas 1993) dalam arka (2015). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat adalah melalui dana perimbangan dalam hal ini diturunkan pemerintah yang berfungsi untuk mendanai kebutuhan masing – masing daerah (swandewi,2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diwujudkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dan tugas pembantuan yang diatur melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini implementasi/tujuan negara terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan berdasarkan undang-undang. Dalam rangka revisi atas undang-undang tersebut diusulkan memasukan *sector* pariwisata sebagai potensi sumber daya lainnya, untuk dimasukkan dalam pasal-pasal yang akan direvisi. Kata kunci :Otonomi Daerah, Sektor Pariwisata, Perimbangan Keuangan Daerah (I Nyoman, 2004).

Yasa (2011) dalam penelitian tentang pengaruh Dampak Kinerja Keuangan

Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Bali. Hasil tersebut menyatakan Dampak Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Bali.

Swandewi (2012) dalam penelitian tentang pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Mirza (2012) dalam penelitian tentang pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah 2006 – 2009. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006 – 2009.

Arka (2015) dalam penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa disparitas pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Melihat adanya keterkaitan pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh kinerja keuangan, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini mereplikasi Tri (2016) yang meneliti pengaruh Dana

Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas pendapatan antar daerah antar terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2015. Perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Tahun penelitian dan penambahan variabel kinerja keuangan.

Alasan mengapa mereplikasi Tri (2016) menuju bahwa dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan disparita pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perbedaan indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2015 dengan indeks pembangunan manusia 69,49% (BPS) sedangkan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 – 2016 dengan indeks pembangunan 69,98% (BPS). Peneliti termotivasi untuk seberapa besar kinerja keuangan, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Alasan mengapa menambah variabel kinerja keuangan adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Dalam penelitian lain menemukan hasil kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat seperti dalam penelitian (Yasa 2011) mendapatkan hasil Dampak Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sejalan dengan hasil penelitian, sehingga penambahan variabel kinerja keuangan tepat untuk digunakan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah ?
4. Apakah disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah ?

C. Pembatas Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dibatasi hanya menguji kinerja keuangan, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat dengan objek penelitian kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2016.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif Kinerja Keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif Pertumbuhan Ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif Disparitas Pendapatan antar Daerah terhadap Kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai pengembangan literatur akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bagian dari kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai bahan acuan, petunjuk dan masukan dalam menjalankan perekonomian dan pembuatan kebijakan sehingga dapat mengembangkan daerahnya, khususnya dalam pembangunan manusia.